

BAB V

KESIMPULAN

Pembangunan berorientasi kemaritiman sebenarnya telah dilaksanakan sejak kepemimpinan Soekarno melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan kemunculan konsep Wawasan Nusantara. Kemudian dikembangkan oleh Soeharto dengan mendapatkan pengakuan hukum internasional UNCLOS 1982, dilanjutkan dengan pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan pengembangan Dewan Kelautan Indonesia oleh Abdurrahman Wahid. Beberapa terobosan tersebut kemudian menjadi langkah fundamental, dan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 terdapat kebijakan untuk membuat Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Sehingga visi PMD ini merupakan bukti adanya kehadiran negara dan pemerintah sebagai wujud nyata untuk mempertahankan aset Indonesia, dengan pengamanan wilayah pesisir, wilayah strategis, pulau-pulau, jaringan perdagangan antar pulau dan aset kelautan lainnya. Diharapkan, salah satu tujuan akhir dari visi ini adalah kesejahteraan rakyat dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, lalu lintas laut yang aman yang menciptakan penyaluran barang dapat mencapai ke wilayah pelosok dengan harga yang adil, dan manfaat kelautan ini tidak hanya diperoleh oleh wilayah pesisir namun juga bagi masyarakat Indonesia.

Keselarsan penerapan visi PMD ini dengan IORA terdapat pada upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh secara strategis, yaitu pengintegrasian di dua kawasan Samudera Hindia dan Pasifik sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri kawasan. Keaktifan Indonesia pada IORA juga mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia yang memiliki permasalahan kemaritiman yang sama dengan IORA. Kelima pilar Poros Maritim Dunia Joko Widodo dengan enam prioritas utama IORA memiliki kesamaan kepentingan yaitu: *Maritime Safety & Security, Trade & Investment Facilitation, Fisheries Management, Disaster Risk*

Management, Academic, Science & Technology, dan Tourism & Cultural Exchanges.

Keenam fokus area ini sesuai dengan lima pilar maritim Joko Widodo yang memfokuskan pada: Membangun kembali budaya maritim Indonesia; Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; Menerapkan Diplomasi Maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan Keamanan Maritim.

Indonesia sendiri dijadikan ketua pada pertemuan *The 15th IORA Council of Ministers Meeting and Its Related Meeting* dilakukan pada 20-23 Oktober 2015 di kota Padang. Pertemuan ini sendiri menghasilkan kesepakatan antara lain: *Padang Communiqué, Declaration on the Establishment of an Ad Committee on the IORA Concord, dan IORA Maritime Cooperation Declaration.* Selain itu ketika Indonesia menjabat sebagai ketua, terdapat terobosan untuk membawa sebuah tema pada masa kepemimpinan Indonesia yaitu “*Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.*”. Dengan mengangkat tema ini, Indonesia menjadi ketua pertama yang menggunakan tema dalam masa kepemimpinannya.

KTT IORA atau *IORA Summit 2017* pada tanggal 7 Maret 2017 di Jakarta adalah terobosan pertemuan yang paling signifikan untuk memajukan kerjasama IORA. *IORA Summit 2017* dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan menghadirkan 16 Kepala Negara/ maupun Kepala Pemerintahan dari 21 negara anggota, 7 negara mitra wicara, beberapa organisasi

internasional, tamu negara yang memiliki ikatan kuat dengan Samudera India. Pertemuan ini merupakan KTT Pertama IORA dan sekaligus perayaan berdirinya '20 Tahun IORA'. KTT membahas isu prioritas IORA terutama keenam sektor fokus area IORA. Pertemuan yang mengambil tema "*Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean*" berfungsi meningkatkan kerjasama pada enam sektor utama di IORA, maupun bagi penguatan komitmen regionalisme di kawasan Samudera Hindia, sekaligus juga pengarusutamaan visi PMD di dunia internasional. Dari IORA Summit 2017 menghasilkan dokumen: *IORA Concord (Jakarta Concord)*, *IORA Action Plan*, *Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism*, dan *Joint Declaration of the IORA Business Community to Build Partnerships for a Sustainable and Equitable Economic Growth*. Dari keempat hasil KTT ini, yang paling berperan bagi IORA kedepannya adalah dengan adanya *Jakarta Concord* dan *IORA Action Plan*.

Jakarta Concord adalah kesepakatan strategis yang berisi visi dan norma kerja sama IORA di masa depan dan mencakup enam area prioritas dari fokus kerja sama IORA, dua isu lintas sektoral, serta penguatan institusi. *Jakarta Concord* juga merupakan peningkatan dalam hal tingkat keterikatan negara anggota pada kesepakatan IORA. *Jakarta Concord* yang disepakati memperkuat komitmen, pada: Memajukan keamanan dan keselamatan maritim; Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi; Memajukan pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab; Memperkuat pengelolaan resiko bencana; Memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan; serta Memajukan kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan. Selain enam kerjasama tersebut, para pemimpin juga mendorong IORA untuk memperkokoh kerja sama di tiga isu lainnya, yaitu: *Blue Economy*; *Women empowerment*; dan demokrasi, termasuk didalamnya isu mengenai *good governance*, pemberantasan korupsi, dan hak asasi manusia. Sementara *IORA Action Plan* merupakan rencana program yang

bersifat strategis pada tiap enam fokus area yang dimiliki IORA dan rencana ini bersifat lintas sektoral. Peningkatan pada keenam fokus ini adalah dengan perumusan konkrit tiap sektor yang menargetkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam tinjauan diplomasi maritim, KTT ini merupakan kesempatan utama untuk menegaskan visi PMD dan pembuktian penerapan dari visi tersebut. KTT dan peran sebagai ketua IORA sekaligus dapat membantu Indonesia mempercepat mewujudkan visi PMD. Sebenarnya dapat dipahami alasan dibalik upaya Indonesia yang berjuang untuk benar-benar membuat *IORA Concord* selesai ketika menjadi ketua IORA. Karena kemudian Indonesia akan lebih dapat memasukkan kepentingan dan bermacam bentuk dari kerjasama kemaritiman yang bertujuan akhir untuk juga dapat mewujudkan dari visi PMD melalui *IORA Concord* dan terutama *IORA Action Plan*.

Sementara dalam keamanan maritim dengan menggunakan matriks keamanan maritim milik Bueger sebagai alat analisa, terdapat dua kepentingan utama Indonesia pada keamanan maritim yaitu pada kerjasama keamanan maritim untuk memberantas ancaman non tradisional dan *blue economy*.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia setidaknya terdapat tiga cakupan yaitu Indonesia dengan IORA, Indonesia dengan perkumpulan Angkatan Laut *Western Pasific Naval Symposium* (WPNS) dan *Indian Ocean Naval Symposium* (IONS), serta kerjasama maritim dari dalam institusi Indonesia sendiri. Dengan IORA kerjasama yang akan dinilai produktif menurut Bueger adalah dengan rencana program *Maritime Domain Awareness* (MDA). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan segala informasi yang ada di kelautan untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan berkaitan dengan maritim. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyelesaian masalah kemaritiman dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sementara dalam tugasnya sebagai ketua IORA dan juga kerjasama dengan Angkatan Laut dari *Western Pasific Naval*

Symposium (WPNS) dan Indian Ocean Naval Symposium (IONS) terutama dalam keamanan maritim Indonesia telah menggelar beberapa acara, diantaranya yaitu: The 2nd International Maritime Security Symposium (IMSS) di Jakarta, tanggal 14-17 September 2015; Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 3 April 2016 bertempat di Batam. IORA Ministerial Economic and Business Conference II (EBC-II) dengan tema “Small and Medium Enterprise and Innovation: Investing in a Sustainable Future”, tanggal 11-13 April 2016 bertempat di Dubai; International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future di Yogyakarta; IORA Business Summit.

Untuk lingkup kerjasama keamanan maritim tingkat nasional upaya Indonesia adalah dengan melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla dapat bertugas sebagai penegak hukum di laut dengan patroli untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah kelautan yurisdiksi Indonesia dan melakukan koordinasi dengan institusi pertahanan maritim atau kelautan lainnya. Bakamla juga telah melakukan beberapa operasi dan program diantaranya yaitu: Operasi Nusantara dan Operasi Palapa yang bekerjasama dengan TNI AL, Polisi Air, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Sasaran operasi ini adalah perompakan, iuu fishing, penyelundupan dan penjualan narkoba, pengangkutan ilegal, *human trafficking*, pelanggaran dokumen pelayaran dan perlindungan maritim lainnya yang sesuai dengan ancaman non tradisional yang dihadapi oleh Indonesia.

Sementara kepentingan keamanan maritim yang kedua adalah *blue economy* yang merupakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan keberlangsungan atau kelestarian dari lingkungan. Sehingga sumberdaya dari *blue economy* dapat dimanfaatkan terus secara berkelanjutan. Di IORA *blue economy* hadir dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memunculkan inovasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di Samudera

Hindia. Dalam meningkatkan *blue economy* strategi yang dilakukan adalah dengan memperbanyak dan mengembangkan program *capacity building* atau *workshop*. Bidang *blue economy* merupakan penanggulangan ancaman non tradisional karena bersinggungan erat dengan *human security*. Terlihat dari program-program ini yang poin tujuan utamanya adalah peningkatan dalam bidang kewirausahaan bagi masyarakat pesisir, melalui seminar, pelatihan, dan agenda lainnya.

Secara garis besar keketuaan Indonesia di IORA telah dianggap sukses setelah mendapat pengakuan dari Perdana Menteri Australia dan Presiden Afrika Selatan. Indonesia mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi perkembangan IORA terutama dengan adanya *Jakarta Concord* dan *IORA Action Plan*. Dengan meningkatkan komitmen setiap negara melalui kepala negara atau pemerintahan tentunya Indonesia telah memberikan penyegaran terhadap rencana dan program yang terdapat pada IORA.

Apabila visi PMD hanya berfokus pada tataran menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudera Pasifik dengan Indonesia sebagai jembatannya dengan IORA maka visi PMD ini bisa saja hampir dinilai tercapai. Namun penerapan visi PMD ini agaknya masih jauh dari kata tercapai. Karena jika merujuk pada pengertian negara maritim dari Hasim Djalal yang mengatakan bahwa negara maritim adalah negara yang mampu memaksimalkan seluruh potensi kemaritiman yang ada maka Indonesia belum mencapai standar tersebut. Apalagi jika tujuan dari visi PMD adalah untuk membangun negara kemaritiman yang berdaulat, maju, independen, dan kuat sehingga mampu berkontribusi bagi secara kewilayahan maupun global dalam hal perdamaian dan keamanan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Maka beberapa bidang yang dinilai masih kurang untuk mewujudkan visi PMD yaitu: infrastruktur, kekuatan militer kelautan, sektor ekonomi yang menekankan kemandirian masyarakat pesisir, koordinasi dan penguatan antar institusi dalam bidang kemaritiman. Meskipun kedepannya peran di IORA mampu memberi dampak penyelesaian permasalahan maritim Indonesia dan menjadi

fasilitas untuk membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia namun secara level nasional Indonesia masih harus terus meningkatkan pemanfaatan potensi yang dimiliki.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih terdapat kekurangan. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam melakukan proses penelitian terutama hanya mengandalkan kajian studi pustaka. Kedepannya masukan dan saran dapat membangun kajian serupa untuk menjadi yang lebih baik. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak lain dan terus dikaji lebih lanjut agar dapat memperbaiki kualitas keilmuan di masa yang akan datang.